

HASIL DISKUSI TOPIK 3:  
GEMA CERMAT DAN  
PENGUNAAN ALAT  
KESEHATAN DALAM NEGERI

# Sub Topik Pembahasan

---

1. Peningkatan Peran AoC GeMa CerMat dalam mendukung program prioritas kesehatan
2. Peningkatan KIE Penggunaan Alkes dan PKRT yang benar
3. Peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri di Fasyankes

# 1. Peningkatan Peran AoC GeMa CerMat dalam mendukung program prioritas kesehatan (1)

Masalah	Upaya
Belum adanya <b>regulasi di tingkat daerah</b> yang dapat lebih memperkuat payung hukum pelaksanaan GeMa CerMat	Pengajuan <b>usulan regulasi di tingkat daerah</b> untuk memperkuat payung hukum pelaksanaan GeMa CerMat dengan menggunakan payung hukum dari pusat (SK Menkes dan SE Dirjen Farmalkes untuk pelaksanaan GeMa CerMat di daerah)
Belum ada <b>jejaring atau pengorganisasian untuk AoC</b> yang mencantumkan peranannya secara jelas	Penyusunan <b>jejaring atau pengorganisasian AoC</b> GeMa CerMat disertai peranannya di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota
Belum adanya petunjuk teknis di tingkat daerah dalam <b>pemanfaatan Dana Desa</b> untuk kegiatan GeMa CerMat (sudah tercantum)	Penyusunan petunjuk teknis dalam <b>pemanfaatan Dana Desa untuk GeMa CerMat</b> sebagai bahan advokasi kepada Pemda setempat

# 1. Peningkatan Peran AoC GeMa CerMat dalam mendukung program prioritas kesehatan (2)

Masalah	Upaya
Kegiatan GeMa CerMat belum memaksimalkan pemanfaatan dana <b>BOK</b>	Advokasi untuk <b>pemanfaatan dana BOK</b> untuk pelaksanaan GeMa CerMat sebagai upaya preventif - promotif
Belum meratanya sosialisasi, advokasi untuk program GeMa CerMat pada seluruh kab/kota/LP/LS dengan disertai komitmen dari Pemda	Pelaksanaan kegiatan <b>advokasi dan sosialisasi GeMa CerMat secara terus menerus</b> baik kepada Pemda, LP/LS, dan masyarakat <b>ke seluruh Kab/Kota</b>
Kurang optimalnya pengembangan AoC di Kab/Kota pasca inisiasi dan sosialisasi	Evaluasi pelaksanaan program GeMa CerMat dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan program melalui pendayagunaan <b>Tim Master AoC sebagai fasilitator</b> dalam pengembangan dan pemanfaatan AoC



## 2. Peningkatan KIE Penggunaan Alkes dan PKRT yang benar

Masalah	Upaya
Kurangnya pengetahuan Tenaga Kesehatan dan AoC tentang KIE Alkes dan PKRT yang benar	Sosialisasi dan Pelatihan kepada tenaga kesehatan dan AoC tentang KIE Alkes dan PKRT yang benar
Belum adanya regulasi/ pedoman tentang pelaksanaan KIE penggunaan Alkes dan PKRT yang benar serta instrumen pendukungnya	Pembuatan Pedoman / NSPK tentang pelaksanaan KIE penggunaan Alkes dan PKRT yang benar dan pembuatan instrument pendukung seperti video, leaflet, dll
Belum adanya anggaran untuk melakukan kegiatan KIE Penggunaan Alkes dan PKRT yang benar di Provinsi dan Kab/Kota	Pengusulan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KIE Penggunaan Alkes dan PKRT yang benar di Provinsi dan Kab/Kota
Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alkes dan PKRT yang baik dan benar	Melakukan sosialisasi secara berjenjang sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan alkes dan PKRT yang benar dengan melibatkan kader kesehatan dan AoC

### 3. Peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri di Fasyankes

Masalah	Upaya
Masih rendahnya tingkat kepercayaan user/tenaga kesehatan terhadap mutu alat kesehatan dalam negeri	Sosialisasi tentang alkes yang sudah mampu dibuat oleh produsen dalam negeri dan telah terjamin keamanan, mutu dan manfaatnya
Masih terbatasnya jenis alkes dalam negeri yang mampu diproduksi dan belum semua masuk ke dalam e-katalog	Pembinaan terhadap produsen alkes dalam negeri untuk menambah jenis yang diproduksi dan mendorong produsen alkes dalam negeri untuk memasukan produknya ke dalam e-katalog
Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi tentang penggunaan alkes dalam negeri	Mengoptimalkan anggaran Dekonsentrasi atau APBD untuk pelaksanaan sosialisasi penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri di fasyankes.
Masih rendahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam pembelian alat kesehatan dalam negeri pada Fasyankes	Meningkatkan pengawasan dengan melibatkan Inspektorat, BPK dan BPKP dalam proses pengadaan serta penegakan sanksi